



PEMERINTAH  
KOTA JAMBI

# 2023



## RENCANA KERJA



BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Juli 2022  
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

**SUHENDRI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700404 199601 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra	.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	.....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	34
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jambi	.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	37
3.3 Program dan Kegiatan	.....	38
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan	.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1 Catatan Penting	.....	57
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan penyusunan rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

1. Sebagai tolok ukur yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Sebagai acuan bagi seluruh aparaturnya Bappeda Kota Jambi didalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya Bappeda Kota Jambi untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

##### Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Berisikan kajian capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

##### Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

##### Bab V. Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2022**

Pelaksanaan Renja Tahun 2023, Untuk Urusan Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

	<b>Anggaran</b>	<b>Relaisasi</b>	<b>Persentase</b>
Belanja Operasi	Rp. 10.530.940.593	Rp. 8.805.785.780	83,62%
Belanja Modal	Rp. 1.143.539.311	Rp. 893.858.724	78,17%
Total	Rp. 11.674.479.904	Rp. 9.699.644.504	83,08%

Sedangkan untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

	<b>Anggaran</b>	<b>Relaisasi</b>	<b>Persentase</b>
Belanja Operasi	Rp.683.358.616	Rp.630.557.656	92,27%
Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	- %
Total	Rp.683.358.616	Rp.630.557.656	92,27%

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Realisasi Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2022**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>(%)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.342.161.253</b>	<b>7.732.639.645</b>	<b>82,77</b>
<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>364.172.869</b>	<b>245.514.869</b>	<b>67,42</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.831.699	57.573.699	93,11
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	302.341.170	187.941.170	62,16
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>4.965.291.555</b>	<b>4.485.414.328</b>	<b>90,34</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.531.759.355	4.116.799.678	90,84
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	390.040.100	332.835.850	85,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.998.850	16.886.100	84,44
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.493.250	18.892.700	80,42
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>54.034.300</b>	<b>40.853.800</b>	<b>75,61</b>
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.106.700	38.104.200	77,59
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.927.600	2.749.600	55,80
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>504.257.800</b>	<b>271.669.428</b>	<b>53,88</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	159.390.000	151.630.600	95,13
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76.567.800	56.862.200	74,26
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.500.000	9.996.800	6,92
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123.800.000	53.179.828	42,96
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.839.032.497</b>	<b>1.594.743.499</b>	<b>86,72</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.764.889	81.739.750	99,97
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	861.227.881	752.011.294	87,32
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.006.987	233.508.144	99,79
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.985.300	53.985.800	91,52
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.876.000	0	0,00

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	37.882.700	20.967.700	55,35
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.945.400	419.187.671	83,85
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.343.340	33.343.140	68,97
<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>440.317.030</b>	<b>210.783.930</b>	<b>47,87</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.317.030	210.783.930	47,87
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>559.912.400</b>	<b>426.414.187</b>	<b>76,16</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.014.800	19.580.000	55,92
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.000.000	235.196.987	80,55
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	40.218.000	40,22
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.897.600	131.419.200	98,89
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>615.142.802</b>	<b>457.245.604</b>	<b>74,33</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.390.000	196.732.411	82,18
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.350.000	49.019.600	95,46
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.920.000	59.538.000	99,36
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	125.496.400	83,66
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.982.802	21.959.193	21,96
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000	4.500.000	31,03
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.121.299.264</b>	<b>945.473.911</b>	<b>84,32</b>
<b>KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>	<b>608.387.187</b>	<b>539.074.996</b>	<b>88,61</b>
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	268.780.287	255.480.287	95,05
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	339.606.900	283.594.709	83,51
<b>KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>257.731.865</b>	<b>195.252.139</b>	<b>75,76</b>
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.074.950	21.749.950	72,32
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	136.210.040	94.661.814	69,50
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	91.446.875	78.840.375	86,21

<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>255.180.212</b>	<b>211.146.776</b>	<b>82,74</b>
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	85.924.962	66.475.224	77,36
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	169.255.250	144.671.552	85,48
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.211.019.387</b>	<b>1.021.530.948</b>	<b>84,35</b>
<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>494.407.429</b>	<b>472.354.413</b>	<b>95,54</b>
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.799.929	78.603.223	85,62
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	402.607.500	393.751.190	97,80
<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEROKENOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	<b>406.581.775</b>	<b>324.537.171</b>	<b>79,82</b>
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107.506.427	73.452.840	68,32
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.664.767	13.238.220	64,06
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.454.091	50.673.459	68,06
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	203.956.490	187.172.652	91,77
<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>310.030.183</b>	<b>224.639.364</b>	<b>72,46</b>
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	204.097.326	164.206.507	80,46
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	105.932.857	60.432.857	57,05
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>683.358.616</b>	<b>630.557.656</b>	<b>92,27</b>
<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	<b>253.915.385</b>	<b>236.989.146</b>	<b>93,33</b>
Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	152.565.385	135.794.646	89,01

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	101.350.000,0	101.194.500	99,85
<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>48.914.630</b>	<b>46.974.200</b>	<b>96,03</b>
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.825.900	45.885.900	95,94
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1.088.730	1.088.300	99,96
<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>96.488.000</b>	<b>90.638.000</b>	<b>93,94</b>
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47.213.000	44.213.000	93,65
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.275.000	46.425.000	94,22
<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>284.040.601</b>	<b>255.956.310</b>	<b>90,11</b>
Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	75.887.180	56.725.436	74,75
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	208.153.421	199.230.874	95,71
<b>Jumlah</b>	<b>12.357.838.520</b>	<b>10.330.202.160</b>	<b>83,59</b>

Realisasi anggaran selama tahun 2022 sebesar 83,59 % dengan silpa anggaran sebesar Rp. 2.027.636.360,-. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2022**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,43	22,84	101,83
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,2	19,28	119,01

2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100	104,95	108,17**
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	100	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada **Sasaran 1** yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut :

### 1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

*Penilaian komponen perencanaan kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.*

Hasil capaian Indikator Sasaran ini adalah sebesar 22,84 dengan capaian sebesar 101,83% dari Target sebesar 22,43.

### 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

*Penilaian komponen pengukuran kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25%, meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%.*

Hasil capaian Indikator Sasaran ini adalah sebesar 19,28 dengan capaian sebesar 119,01% dari Target sebesar 16,20.

Berdasarkan kriteria sub komponen penilaian pada LKE, Bappeda Kota Jambi sebagai penanggung jawab untuk capaian komponen penilaian Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sebagai pembentuk nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi 2019 s/d 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Capaian SAKIP Kota pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja 2019 s/d 2022**

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI							
			2019		2020		2021		2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	21,85	<b>21,85</b>	22,01	<b>22,23</b>	22,30	<b>22,36</b>	22,43	<b>22,84</b>
2	Pengukuran Kinerja	25	15,75	<b>15,75</b>	15,90	<b>16,04</b>	16,00	<b>16,10</b>	16,20	<b>19,28</b>

Dari hasil capaian Sasaran 1 dapat disimpulkan bahwa terkait tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah, nilai komponen Perencanaan Kinerja dan nilai Pengukuran Kinerja tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan dalam dalam RPJMD Kota Jambi.

**Pada Sasaran 2** yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

*Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.*

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 108,17%. berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja Pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator Sasaran pada RPJMD, terdapat beberapa Indikator Sasaran belum dirilis yaitu, diantaranya Nilai SAKIP yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan–RB, Indeks survey persepsi Korupsi yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan–RB dan Indeks Pemberdayaan Gender yang belum dikeluarkan oleh BPS.

.Adapun Indikator Sasaran yang realisasi capaiannya mencapai 100% bahkan lebih adalah : Indeks Pelayanan Publik sebesar 105,38%, Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan sebesar 108,69%, Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan sebesar 100,73%, 105,88%, Indeks Kualitas Air sebesar 106,52%, Indeks Kualitas Udara sebesar 109,08%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 111,25%, Persentase peningkatan PAD sebesar 142,77%, Realisasi Investasi sebesar 149,46%, Tingkat Pengangguran Terbuka 106,77%, Angka Harapan Hidup sebesar 100,24%, Harapan Lama Sekolah sebesar 100%, dan Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 100,1%.

**Tabel 4. Capaian 16 Indikator Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022**

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2022		
Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Berbasis TI	Nilai SAKIP	B	B	100%
	Indeks Pelayanan Publik	3,99% (B)	4,205% (A-)	105,38%
Menurunkan Tingkat Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERWAL	Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan	84%	91,30%	108,69%
Meningkatkan Layanan infrastruktur dan utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63,31%	63,77%	100,73%
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	39,9%	42,50%	106,52%
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	80,76%	86,09%	109,08%
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,87%	49,92%	111,25%
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80	77,50	96,87%
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	12,85%	142,77%
Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	498,35 M	744,825 M	149,46%
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,6	8,95	106,77%
Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,81%	72,99%	100,24%
Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,38	15,38	100%
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4	67,88 (2021)	99,24%
Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,90%	57,96%	100,1%

Selanjutnya, untuk **Sasaran 3** yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan formulasi sebagai berikut :

*Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.*

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini di tahun 2022 sebesar 100%.

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran. Capaian dikatakan **efisien** jika realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi anggaran. Sedangkan **tidak efisien** jika capaian realisasi kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi anggaran.

**Tabel 5. Efisiensi Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3-4
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Target: 22,43 Capain : 22,84 101,83%	84,35%	18,88%
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Target : 16,20 Capaian : 19,28 119,01%		36,06%
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	108,17%*	84,32%	23,85%
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	92,27%	7,73%

Ket : \*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja

Dari hasil analisis efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dapat disimpulkan bahwa capaian Bappeda telah efisien, hal ini dapat dilihat dari dari 3 (tiga) indikator kinerja utama Bappeda berada pada capaian yang efisien dengan realisasi kinerja minimal diatas 100%.

Selanjutnya, selain bertanggungjawab ternadap nilai SAKIP Kota Jambi pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bappeda Kota Jambi juga melaksanakan tugas untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dinilai oleh Inspektorat Kota Jambi, yaitu penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kemudian penilaian Profesionalitas ASN oleh Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Kota Jambi, serta Penilaian Pengelolaan Arsip oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Aapun hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6 : Capaian SAKIP, PMPRB, IP ASN dan Pengelolaan Arsip Bappeda Kota Jambi sampai dengan tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target*	Realisasi
1	Nilai SAKIP	79 - 80 (A)	<b>79,64</b> (BB)	80 - 81 (A)	<b>80,43</b> (A)	80 - 81 (A)	Dinilai tahun 2023
2	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	56 - 60 (Rendah)	<b>71,82</b> (Sedang)	61 - 65 (Rendah)	<b>68,25</b> (Rendah)	66 - 70 (Rendah)	<b>78,61</b> (Sedang)
3	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	70 - 71 Sangat Baik	<b>69,68</b> Cukup Baik	71 - 72 Sangat Baik	Hasil belum di release Inspektorat	72 - 73 Sangat Baik	Hasil belum di release Inspektorat
4	Nilai Pengelolaan Arsip	50 - 55	<b>56</b>	56 - 65	<b>65,89</b> (Peringkat III)	66 - 75	<b>79,19</b> (Peringkat III)

Penilaian SAKIP Bappeda Kota Jambi tahun 2021 tersebut diatas merupakan hasil yang dinilai dan rilis oleh Inspektorat Kota Jambi di Tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Penilaian SAKIP Bappeda Kota Jambi tahun 2021**

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai 2020 (%)	Nilai 2021 (%)	Rekomendasi Inspektorat terhadap Evaluasi tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	25,80	28,00	Melakukan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala dan menerapkan implementasi <i>reward and punishment</i> terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja
2	Pengukuran Kinerja	25	18,44	20,94	Melakukan pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward and punishment</i> .
3	Pelaporan Kinerja	15	13,07	10,78	1) Melakukan perbaikan LKj dengan melengkapi data yang dapat ditelusuri; 2) Informasi kinerja serta hasil evaluasi program yang telah dibuat agar ditindak-lanjuti untuk perencanaan dan peningkatan kinerja serta untuk perbaikan pelaksanaan program guna menilai kinerja dan meningkatkan kinerja yang akan datang.
4	Evaluasi Kinerja	10	6,20	5,20	Melaksanakan evaluasi program dengan memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa datang.
5	Pencapaian Kinerja	20	16,13	15,42	Tidak terdapat rekomendasi atas komponen capaian kinerja karena pencapaian kinerja telah memadai
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>79,64</b> <b>BB</b> <b>(Sangat Baik)</b>	<b>80,34</b> <b>A</b> <b>(Memuaskan)</b>	

Berdasarkan Interpretasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian PAN-RB ([www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/tingkat-penilaian-akip-rating](http://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/tingkat-penilaian-akip-rating)), menggambarkan bahwa pengukuran kinerja Bappeda Kota Jambi telah dilakukan sampai ke level eselon

4/Pengawas/Subkoordinator sehingga dapat mewujudkan kinerja yang berorientasi hasil. Hal ini terus menjadi perhatian untuk meningkatkan pengukuran kinerja sampai dengan level individu.

Dari Tabel diatas juga dapat dilihat bahwa hasil P NPRB Bappeda Kota Jambi tahun 2020 yang dinilai pada tahun 2021 dan tahun 2021 yang dinilai tahun 2022 juga sudah sangat baik. Sedangkan untuk PMPRB Tahun 2022 akan dilakukan penilaian pada Tahun 2023.

Adapun Indeks profesionalitas ASN (IP-ASN) yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh BKPSDMD Kota Jambi terhadap Bappeda Kota Jambi Tahun 2022 tersebut pada tabel diatas, dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Penilaian IP-ASN Bappeda Kota Jambi Tahun 2022**

No	Tingkat Profesionalitas ASN	Tahun 2021	Tahun 2022	%
1	Sangat Tinggi	4 orang	2 orang	5,56
2	Tinggi	12 orang	19 orang	52,78
3	Sedang	4 orang	8 orang	22,22
4	Rendah	6 orang	4 orang	11,11
5	Sangat Rendah	14 orang	3 orang	8,33
	Jumlah	<b>40 orang</b>	<b>36 orang</b>	<b>100</b>
	<b>Total Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>68,25 (Rendah)</b>	<b>78,61 (Sedang)</b>	

Jumlah ASN Bappeda Kota Jambi tahun 2022 berkurang sebanyak 4 orang dibandingkan tahun 2021, yaitu 3 orang promosi ke perangkat daerah lain dan 1 orang pindah tugas ke daerah lain.

Secara umum sudah cukup baik. Capaian tahun 2022 telah melebihi

target, yaitu 78,61 dari target 66-76. Dan dapat dilihat, bahwa lebih dari setengah pegawai/ASN Bappeda Kota Jambi di tahun 2022 dengan kategori profesionalitas Sangat Tinggi dan Tinggi, yaitu sebesar 58,33%. Namun, kedepannya akan tetap menjadi perhatian untuk ditingkatkan kompetensi setiap ASN.

Terkait dengan penilaian atau Audit Kearsipan Internal mulai dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2020. Penilaian ini bertujuan sebagai pemicu bagi perangkat agar memperhatikan pengelolaan kearsipan yang ada di instansinya masing-masing. Dimana kegiatan Penilaian Pengelolaan Kearsipan menilai sejauh mana perangkat daerah tersebut patuh pada peraturan kearsipan, pemenuhan sumber daya kearsipan dan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan, juga bagaimana penganggaran untuk kearsipan.

Pengelolaan arsip Bappeda Kota Jambi berupaya terus melakukan pembinaan guna membenahan penyelenggaraan arsip untuk menjamin terciptanya dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan mewujudkan pengelolaan arsip yang handal. Pada tahun 2021, penilaian penyelenggaraan arsip internal oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi memperoleh skor nilai 65,89 dari target 56-65, dan berhasil meraih peringkat III terbaik pengelolaan arsip tingkat Pemerintah Kota Jambi. Kemudian, pada tahun 2022, meskipun skor nilai 79,19 dapat melebihi target yang ditetapkan 66-75, namun hanya mampu bertahan di peringkat III terbaik pengelolaan arsip tingkat Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan tim penilai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi bahwa, secara umum pengelolaan arsip Bappeda sudah baik, namun masih ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang, antara lain ruang kerja dari pengelola arsip, alih media arsip dan sarana prasarana penyimpanan arsip.

Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran Bappeda Kota Jambi Tahun 2022 hanya mencapai 83,59%, namun secara keseluruhan

pelaksanaan program dan kegiatan telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu utama adalah adanya potensi resesi global yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dan pencapaian target kinerja. Sedangkan isu internal yaitu masih rendahnya kualitas perencanaan sehingga perlu ditingkatkan. Hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Jambi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### **2.3.1. Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi difokuskan pada pelayanan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah yang dapat meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

### **2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a) Masih diperlukannya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan;
- c) Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada PD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
- d) Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;

Selain permasalahan tersebut, sebagai sebuah institusi yang menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh perangkat daerah dalam jajaran Pemerintahan Kota Jambi, terutama dalam hal koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, sangat dibutuhkan tenaga perencana (*planner*) yang mampu menganalisa berbagai faktor pembangunan daerah guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Untuk menjalankan fungsi Koordinasi tersebut, sangat dibutuhkan tenaga perencana (*planner*) yang mampu menganalisa berbagai faktor pembangunan daerah guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Adapun permasalahan lainnya pada sumberdaya aparatur yang ada tersebut, antara lain :

- a. Dengan adanya penyetaran jabatan dari Eselon IV menjadi Fungsional Perencana, dimana dari 13 orang Eselon IV beralih menjadi JFT Perencana saat ini tinggal 10 orang, karena 3 orang lainnya dipromosikan dalam Jabatan Administrator (Kabid).
- b. Seluruh JFT Perencana tersebut tidak mempunyai basic pendidikan perencanaan dan belum pernah mengikuti diklat perencanaan.
- c. Sub koordinator, seyogyanya memiliki 2 atau 3 orang PNS staf teknis pendamping. Kondisi saat ini, hanya dibantu oleh TKK untuk pelaksanaan tugas koordinasi dengan mitra kerja perangkat daerah. Sedangkan PNS staf/fungsional umum saat ini hanya terkonsentrasi pada pekerjaan pengelola keuangan kegiatan saja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bahwa setiap instansi pemerintah wajib

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB-ABK).

Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menyusun sampai dengan tahun 2025, setidaknya jumlah pegawai BAPPEDA Kota Jambi berjumlah 119 orang, maka telah disampaikan usulan formasi kebutuhan PNS kepada Walikota Jambi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi.

Maka dari itu, sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka memperkuat kapasitas perencanaan pembanguna dan pengembangan daerah antara lain:

1. Meningkatkan SDM Perencanaan melalui Diklat Teknis Perencanaan,
2. Memperkuat Koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan stakeholder,
3. Meningkatkan peran serta perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kreatifitas / inovasi

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Review ini dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 9. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA JAMBI TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	73	8.552.304.363	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	73	8.514.314.256	
1	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Nilai SAKIP	80 nilai	418.000.000	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Nilai SAKIP	80	438.207.654	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	85.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	74.805.466	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	333.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	363.402.188	
2	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	5.285.105.691	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	5.223.108.602	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	37 Orang/bulan	4.852.850.188	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	37 ASN	4.815.467.899	
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen - Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	12 Dokumen 26 orang	385.067.647	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen - Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	12 Dokumen 26 orang	360.452.847	
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen	2 Dokumen	22.193.018	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen	2 dokumen	22.193.018	
2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan	12 Laporan	24.994.838	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan	12 Laporan	24.994.838	
3	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>54.498.320</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>54.498.320</b>	
3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	54.498.320	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	54.498.320	
4	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>	<b>100%</b>	<b>463.130.400</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>	<b>100%</b>	<b>464.630.400</b>	
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	142 Stel	118.215.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	142 Stel	118.215.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	105.615.400	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	107.115.400	
4.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Diklat	166.500.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37 Orang	166.500.000	
4.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang/Kali	72.800.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang/Kali	72.800.000	
5	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>1.029.088.577</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>1.046.470.220</b>	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	85.871.278	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	85.871.286	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	19.425.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	19.425.000	
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	242.479.787	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 Paket	250.105.535	
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	53.473.750	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	52.818.851	
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.440.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	42.009.120	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	50.223.900	
5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	535.800.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	535.800.000	
5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	45.029.642	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	46.785.648	
6	<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>TERTIB PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>12.200.000</b>	<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>TERTIB PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>11.372.455</b>	
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	12.200.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	11.372.455	
7	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>548.471.375</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>548.445.525</b>	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	30.598.975	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	30.573.125	
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100 Mbps 40000 Kwh 50 m3	265.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100Mbps 40000 Kwh 50m3	265.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	111.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	111.000.000	
7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	141.872.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	141.872.400	
8	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>TERTIB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>741.810.000</b>	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>TERTIB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>727.581.080</b>	
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	203.720.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	197.390.000	
8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	56.690.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	53.020.000	
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	59.620.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	59.800.000	
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Tahun	66.600.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	62.191.080	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	340.680.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	340.680.000	
8.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	14.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	14.500.000	
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>1.347.953.206</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>1.382.954.275</b>	
9	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>887.995.035</b>	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>887.993.685</b>	
9.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	377.999.928	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	379.999.928	
9.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	509.995.107	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	507.993.757	
10	<b>KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Akurasi data Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>249.973.375</b>	<b>KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Akurasi data Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>244.972.434</b>	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	199.981.890	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	195.000.709	
10.2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	49.991.485	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	49.971.725	
11	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>209.984.796</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>249.988.156</b>	
11.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	39.996.696	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	30.196.696	
11.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 dokumen	169.988.100	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	219.791.460	
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>NILAI SAKIP KOMPONEN PERENCANAAN &amp; PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>21,82 nilai</b>	<b>1.191.101.117</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>NILAI SAKIP KOMPONEN PERENCANAAN &amp; PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>22,64 &amp; 16,40</b>	<b>1.184.565.080</b>	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>21,81</b>	<b>599.999.777</b>	<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>25,23 &amp; 16,54</b>	<b>599.999.777</b>	
12.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	96.062.872	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	96.062.872	
12.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	503.936.905	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	503.936.905	
13	<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEROKENOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>22,33</b>	<b>227.727.791</b>	<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEROKENOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>26,87 &amp; 18,07</b>	<b>221.191.754</b>	
13.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	111.013.403	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	111.013.540	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 OPD	21.777.207	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 OPD	21.777.207	
13.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	74.541.532	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	74.541.445	
13.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 OPD	20.395.649	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 OPD	13.859.562	
14	<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>20,54</b>	<b>363.373.549</b>	<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>24,40 &amp; 16,57</b>	<b>363.373.549</b>	
14.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	2 Dokumen	219.682.705	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	219.682.705	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
14.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD	143.690.844	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD	143.690.844	
IV	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>692.166.621</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>692.166.389</b>	
15	<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	<b>Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>100%</b>	<b>139.430.327</b>	<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	<b>Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>100%</b>	<b>139.430.327</b>	
15.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Fasilitasi	139.430.327	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Fasilitasi	139.430.327	
16	<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>99.381.181</b>	<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99.381.181</b>	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	99.381.181	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	99.381.181	
17	<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>102.999.606</b>	<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>100%</b>	<b>102.999.606</b>	
17.1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	49.999.707	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	49.999.707	
17.2	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	52.999.899	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	52.999.899	
18	<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>Persentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>62</b>	<b>350.355.507</b>	<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>Nilai Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>62</b>	<b>350.355.275</b>	
18.1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Kali	110.742.139	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Kali	110.741.907	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Kategori 1 Kali	239.613.368	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lomba	239.613.368	
	<b>TOTAL</b>			<b>11.783.525.307</b>				<b>11.774.000.000</b>	

Berdasarkan tabel 9 diatas, terdapat perubahan anggaran antara Rancangan Awal RKPD 2023 dengan analisis hasil kebutuhan, dimana terdapat pengurangan jumlah anggran sebesar Rp 9.525.307.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan Kota Jambi tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023.

Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan hingga Musrenbang Tingkat Kota untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Rancangan Renja Bappeda didiskusikan pada Forum Perangkat Daerah. Dalam pembahasannya, tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, DPRD Kota Jambi, *Stakeholder*, maupun perguruan tinggi.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jambi**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Visi tersebut adalah “*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kemudian, sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun keempat dalam RPJMN 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan ibu kota nusantara

Fokus pembangunan nasional berdasarkan Tema RKP Tahun 2023 yakni *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Tentunya, keberhasilan pembangunan secara makro Kota Jambi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada Provinsi Jambi. Untuk itu, prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah, perlu dioptimalkan.

Dokumen perencanaan pembangunan Kota Jambi yang dipedomani dalam menyusun RKPD Kota Jambi Tahun 2023 adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 diarahkan pada *“Pemantapan Pelayanan Publik selaras dengan Peningkatan Perdagangan dan Jasa untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif dan Berkelanjutan”*.

Dikaitkan dengan visi Pembangunan Kota Jambi dalam RPJMD 2018 – 2023 yaitu *“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis*

*Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima*”, melalui 5 (lima) misi pembangunan yakni Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi; Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat; Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan; Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan; dan, Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, maka, sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut, yakni menyelenggarakan penguatan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah yang berkualitas, sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan nasional.

Disamping itu, eksistensi Bappeda juga sebagai salah satu perangkat daerah yang berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi pertama, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 1 Pembangunan Kota Jambi tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan”.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka sasaran kinerja yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan organisasi adalah :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, dengan indikator sasaran kinerja yaitu Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja 22,64 dan Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja;

2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD; dan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mengemban 2 (dua) urusan penunjang yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka program dan kegiatan pada Bappeda Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah dengan target capaian nilai 72;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator program adalah kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah dengan target capaian 100%,
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator program adalah Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan dengan target 22,64 dan Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja dengan target 16,40; dan
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator program adalah Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan target 100%.

### **3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

Secara rinci rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai mana tabel berikut :

**Tabel 10. Rumusan Rencana Program-Kegiatan Bappeda Kota Jambi  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Dana	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN PERENCANAAN</b>				<b>11.081.833.611</b>				<b>12.805.402.341</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>73</b>	<b>8.514.314.256</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD & DAU		<b>75</b>	<b>9.808.244.603</b>
<b>1</b>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>80</b>	<b>438.207.654</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>80</b>	<b>375.000.000</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	74.805.466	Bappeda Kota Jambi	PAD		6 dokumen	70.000.000
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	363.402.188	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 dokumen	305.000.000
<b>2</b>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>5.223.108.602</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD & DAU		<b>100%</b>	<b>5.011.706.603</b>
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	37 ASN	4.815.467.899	Bappeda Kota Jambi	DAU		37 ASN	4.569.166.503
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen - Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	12 Dokumen 26 orang	360.452.847	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Dokumen 26 orang	390.040.100
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen	2 dokumen	22.193.018	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 dokumen	25.000.000

6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	12 Laporan	24.994.838	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 laporan	27.500.000
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>54.498.320</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>59.358.200</b>
7	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Jenis BMD	54.498.320	Bappeda Kota Jambi	PAD		6 Jenis BMD	59.358.200
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>	<b>100%</b>	<b>464.630.400</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>459.151.000</b>
8	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142 Stel	118.215.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		140 Stel	127.050.000
9	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	107.115.400	Bappeda Kota Jambi	PAD		3 Dokumen	92.526.500
10	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37 Orang	166.500.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		6 diklat	180.361.500
11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang/Kali	72.800.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		4 orang/kali	59.213.000
5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>1.046.470.220</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>2.101.404.800</b>
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	85.871.286	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 Tahun	97.050.800
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	19.425.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 Tahun	924.991.100
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 Paket	250.105.535	Bappeda Kota Jambi	PAD		6 Paket	283.148.800
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	52.818.851	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	71.372.400

16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.440.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	20.420.400
17	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	50.223.900	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	45.838.100
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	535.800.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	604.934.000
19	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	46.785.648	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	53.649.200
6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>TERTIB PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>11.372.455</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>378.760.800</b>
20	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	11.372.455	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 tahun	378.760.800
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>548.445.525</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>678.540.500</b>
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	30.573.125	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	43.898.800
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100Mbps/bln 77000 KWH/bln 50m3/bln	265.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		130Mbps/bln 77000 KWH/bln 50m3/bln	353.320.000
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	111.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	121.000.000
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	141.872.400	Bappeda Kota Jambi	PAD		12 Bulan	160.321.700
8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>TERTIB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>727.581.080</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>744.322.700</b>

25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	197.390.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	12 Bulan	289.661.900
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	53.020.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	12 Bulan	62.133.500
27	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	59.800.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	12 Bulan	72.503.200
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	62.191.080	Bappeda Kota Jambi	PAD	1 tahun	181.500.000
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	340.680.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	1 tahun	120.979.100
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	14.500.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	1 tahun	17.545.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>1.382.954.275</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD	<b>100%</b>	<b>1.490.000.000</b>
<b>9</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>887.993.685</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD	<b>100%</b>	<b>970.000.000</b>
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	379.999.928	Kota Jambi	PAD	1 Berita Acara	370.000.000
32	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	507.993.757	Bappeda Kota Jambi	PAD	6 Dokumen	600.000.000

10	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Akurasi data Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>244.972.434</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>
33	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	195.000.709	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 dokumen	35.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	-				40 Orang	170.000.000
34	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Dokumen	49.971.725	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 Dokumen	55.000.000
11	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>249.988.156</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>
35	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	30.196.696	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 Laporan	90.000.000
36	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	219.791.460	Bappeda Kota Jambi	PAD		3 Laporan	170.000.000
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>NILAI SAKIP KOMPONEN PERENCANAAN &amp; PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>22,64 &amp; 16,40</b>	<b>1.184.565.080</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>23,50 &amp; 16,99</b>	<b>1.507.157.738</b>
12	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>25,23 &amp; 16,34</b>	<b>599.999.777</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>26,82 &amp; 18,64</b>	<b>624.606.315</b>

37	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	96.062.872	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 dokumen	105.669.410
38	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	4 Dokumen	503.936.905	Bappeda Kota Jambi	PAD		4 dokumen	518.936.905
<b>13</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam)</b>	<b>Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>26,87 &amp; 18,07</b>	<b>221.191.754</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>26,99 &amp; 18,32</b>	<b>241.040.303</b>
39	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	2 Dokumen	111.013.540	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 Dokumen	119.884.615
40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 OPD	21.777.207	Bappeda Kota Jambi	PAD		6 OPD	23.044.025
41	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	2 Dokumen	74.541.445	Bappeda Kota Jambi	PAD		2 Dokumen	83.026.437
42	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 OPD	13.859.562	Bappeda Kota Jambi	PAD		-	15.085.226
<b>14</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>24,40 &amp; 16,57</b>	<b>363.373.549</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>24,52 &amp; 16,81</b>	<b>641.511.120</b>

43	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	2 Dokumen	219.682.705	Bappeda Kota Jambi	PAD	2 Dokumen	489.541.722
44	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD	143.690.844	Bappeda Kota Jambi	PAD	-	151.969.398
<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				<b>692.166.389</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>720.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>692.166.389</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD	<b>100%</b>	<b>720.000.000</b>
15	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<b>Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	100%	139.430.327	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	170.000.000
45	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Fasilitasi	139.430.327	Bappeda Kota Jambi	PAD	2 Fasilitasi	170.000.000
16	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<b>Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	100%	99.381.181	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	105.000.000
46	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	99.381.181	Bappeda Kota Jambi	PAD	2 Dokumen	105.000.000
17	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<b>Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	100%	102.999.606	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	105.000.000

47	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	49.999.707	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 Dokumen	50.000.000
48	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	52.999.899	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 Dokumen	55.000.000
<b>18</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>62</b>	<b>350.355.275</b>	Bappeda Kota Jambi	PAD		<b>65</b>	<b>340.000.000</b>
49	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Kali	110.741.907	Bappeda Kota Jambi	PAD		5 Kali	100.000.000
50	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lomba	239.613.368	Bappeda Kota Jambi	PAD		1 Lomba	240.000.000

Pagu anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota sebagaimana tabel diatas tertuang dalam matrik yang sudah diinput melalui aplikasi SIPD.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dalam menopang misi pemerintah daerah yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dengan Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK dengan indikator sasaran meningkatnya nilai SAKIP.

Untuk Tahun 2023, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 11. Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Jambi Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PERENCANAAN</b>					
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.248.306.272</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>82</b>	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364,121,540	Nilai SAKIP Kota	80	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61,776,000	jumlah dokumen	6 dokumen	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	302,345,540	jumlah dokumen	2 dokumen	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.859.206.603	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.419.166.503	Jumlah ASN	37 Orang/bulan	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	390.040.100	jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	26 orang	

	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,000,000	jumlah dokumen akuntansi	2 dokumen	
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.000.000	Jumlah Laporan	12 laporan	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>59.382.000</b>	<b>Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	53.962.000	Jenis barang	6 jenis	
	2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.420.000	Jumlah Laporan	13 Laporan	
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>417.410.000</b>	<b>Tertib Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.500.000	jumlah pakaian	140 stel	
	2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	84.115.000	jumlah data	3 data	
	3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	163.965.000	jumlah diklat	6 diklat	
	4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.830.000	Jumlah Bimtek	4 orang/kali	
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.910.368.000</b>	<b>Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.228.000	Jumlah Komponen /Instalasi Telekomunikasi, Sumberdaya air dan listrik	1 paket	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.901.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	257.408.000	Jumlah Bahan Logistik	3 Paket	
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.884.000	Jumlah cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.564.000	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.671.000	Jumlah kunjungan	12 Bulan	
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.940.000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	

	8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.772.000	jumlah Arsip dinamis	12 Bulan	
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>344.328.000</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	344.328.000	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 tahun	
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>616.855.000</b>	<b>Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.908.000	Jumlah surat menyurat	12 bulan	
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.200.000	Jumlah jasa komunikasi Jumlah jasa listrik Jumlah jasa sumber daya air	100 Mbps 40000 kwh 50 M3	
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.747.000	Jumlah jasa pelayanan umum	12 bulan	
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>676.657.000</b>	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263.329.000	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	
	2.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.485.000	Jumlah kendaraan	12 Bulan	
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.912.000	Jumlah peralatan dan mesin	12 Bulan	
	4.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	165.000.000	Jumlah aset tetap lainnya	1 tahun	
	5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.981.000	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	
	6.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.950.000	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	

<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>1.383.000.000</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	
<b>1.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>888.000.000</b>	<b>Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>100 Persen</b>	
	1.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	368.000.000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	
	2.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD)	6 Dokumen	
<b>2.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>245.000.000</b>	<b>Akurasi Data Pembangunan Daerah</b>	<b>4 Data</b>	
	1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 dokumen	
	2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	165.000.000	Jumlah OPD Produsen Data	40 OPD	
	3.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Buku Profil Kota Jambi	1 Buku	
<b>3.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>250.000.000</b>	<b>Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
	1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	80.000.000	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Kali	
	2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	170.000.000	Jumlah Dokumen	3 Dok	

<b>III</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>1.670.033.513</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</b>	<b>22,64 &amp; 16,40</b>	
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>833.461.900</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia</b>	<b>25,23 &amp; 16,34</b>	
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.063.100	Jumlah dokumen	2 dokumen	
	2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	737.398.800	Jumlah dokumen	4 dokumen	
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>228.875.257.707</b>	<b>Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>26,87 &amp; 18,07</b>	
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	113.527.065	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	6 OPD	
	2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.821.830	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Perekonomian	6 OPD	
	3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.623.587	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	2 OPD	
	4.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.285.225	Jumlah monev perencanaan Bidang SDA	2 OPD	
<b>3.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>608.313.906</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24,40 &amp; 16,57</b>	

	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.732.760	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	5 OPD	
	2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	463.581.146	Jumlah monev perencanaan bidang infrastruktur	5 OPD	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>718.423.416</b>	<b>Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</b>	<b>100%</b>	
	<b>1.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>178.173.785</b>	<b>Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah</b>	<b>100%</b>	
	1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	161.175.185	Jumlah fasilitasi/ koordinasi	2 Fasilitasi	
	2.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	16.998.600	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
	<b>2.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>99.381.300</b>	<b>Terlaksananya hasil kajian yang di rekomendasikan bidang sosial budaya dan kependudukan</b>	<b>100%</b>	
	1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	99.381.300	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	
	<b>3.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>102.999.891</b>	<b>Terlaksananya hasil kajian yang di rekomendasikan bidang ekonomi dan pembangunan</b>	<b>100%</b>	
	1.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	52.999.987	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
	2.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	49.999.904	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
	<b>4.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>337.868.440</b>	<b>Persentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Nilai 62</b>	

	1.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	99.999.840	FGD/Raker/Rakor/tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	5 Kali	
	2.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	237.868.600	Jumlah Fasilitas Inovasi Daerah  Jumlah Lomba Inovasi	2 Kategori  1 Kali	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2023 merupakan penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Disamping itu juga untuk sinergitas dalam perencanaan juga mengakomodir dan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan lainnya disamping Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam memberikan bahan masukan penyusunan RKPD, dimana memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum Perangkat Daerah dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) guna menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan. Melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif, *bottom up/top down*, program dan kegiatan disusun guna menjamin perbaikan berkesinambungan (*continues improvement*).

#### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023.

Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Tahun 2021 serta pencapaian indikator kinerja OPD. Dokumen ini juga memuat perumusan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya untuk anggaran Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jambi. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dibuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

## **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Mengingat dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Bappeda Kota Jambi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berada dalam lingkup Bappeda Kota Jambi berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan RKA Tahun 2023 dengan berpedoman pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2023.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.